



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 907/III/V/2016

**Konservasi Alam Raja Ampat
Harus Tetap Terjaga**

**DPR Harap Revolusi Mental
Jangan Hanya Sekedar Jargon**

**Inspektorat Utama DPR
Launching E-LIT**



GRATIS! Tidak Diperjualbelikan

Konservasi Alam Raja Ampat Harus Tetap Terjaga

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron berharap keindahan kawasan konservasi laut di Pianemu, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang menjadi kawasan wisata terus terjaga dengan baik. Apalagi keindahan Raja Ampat sudah menjadi salah satu destinasi wisata dunia.

Hal itu disampaikan kepada Parlemen, disela-sela kunjungannya ke Situs Warisan Bentangalam Kars Painemu, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (9/5). Pernyataan ini terkait kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam masa reses ke Provinsi Papua Barat.

"Inilah kekayaan alam yang tidak ternilai dan ini masuk di dalam *world heritage*. Jadi memang ini menjadi warisan dunia yang hanya ada dua di dunia. Saya kira ini adalah sebuah keindahan yang bukan saja menjadi milik Indonesia, tetapi milik dunia," katanya.

Untuk itu, kata politisi F-PD itu, DPR berkomitmen agar kawasan wisata ini terus dikelola dan dijaga dengan baik.

"Saya kira kami (DPR, red) harus terus menjaga dan mengawalinya, tentu dengan berbagai pembenahan dan perlindungan agar kawasan konservasi ini dapat terjaga keasliannya," imbuhnya.

Seperti diketahui, kawasan konservasi laut Pianemu dikelola bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Apalagi Kementerian KP merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Herman mengaku bangga dengan keindahan alam Papua Barat. Walaupun berada jauh dari ibukota negara (Jakarta, red), Papua Barat telah menjadi salah satu ikon wisata dunia.

"Kami merasakan sebuah kebesaran, merasakan sebuah kawasan yang tentu dihargai oleh seluruh dunia dan ini adalah kebanggaan Indonesia," puji politisi asal

dapil Jawa Barat itu.

Selain ke Pianemu, masih kata Herman, Tim Kunker Komisi IV DPR RI juga akan mengunjungi Sorong, merupakan wilayah Provinsi Papua Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kondisi sektor pertanian, diantaranya terkait dengan tanaman pangan, ketersediaan pangan maupun peternakan yang nantinya bisa dikembangkan di Provinsi Papua Barat.

"Setelah itu, kami akan ke Manokwari bertemu dengan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Papua Barat, tentu dalam rangka menyerap berbagai aspirasi dan apa yang menjadi harapan masyarakat Papua Barat untuk menyejahterakan rakyatnya," kata Herman. Kunker Komisi IV DPR juga diikuti oleh Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDIP), Yadi Srimulyadi (F-PDIP), Sjachrani Mataja (F-GERINDRA), Andi Nawir (F-GERINDRA), Muhammad Nasyit Umar (F-PD), Haerudin (F-PAN), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), Taufik R. Abdullah (F-PKB), Hermanto (F-PKS), Sa'adudin (F-PKS), Zainut Tauhid Sa'adi (F-PPP), Suleman L. Hamzah (F-NASDEM), Saniatul Lativa (F-PG). ■

(ot), foto : nitu/hr



Tim Kunker Komisi IV DPR Saat Kunjungi Raja Ampat

Parlemen Indonesia-Korea Bahas Empat Topik Utama

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menerima kunjungan Ketua Asosiasi Persahabatan Anggota Parlemen Indonesia-Korea dan Ketua Komite Ekonomi Partnership, Ahn Hong-Jun. Ada empat topik utama yang menjadi pembahasan dalam pertemuan bilateral ini, kerjasama investasi ekonomi, pertahanan, pelatihan Saemaul Undong, serta peningkatan bidang pertanian.

Saya menerima kunjungan dari Ketua GKSB Korea Mr. Ahn, anggota parlemen dari Korea yang memang menjadi Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia-Korea. Beliau juga sangat sering datang ke Indonesia. Hal ini juga untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Korea," papar Fadli, di Gedung DPR, Rabu, (4/5).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dibahas adalah, investasi Korea di Indonesia. Fadli menguraikan investasi yang dikehendaki Indonesia adalah penanaman modal yang senantiasa melibatkan tenaga kerja lokal.

Sehingga dengan hal itu, tambah Fadli, ada *transfer of knowledge* kepada para pekerja lokal. Mengambil pelajaran dari Tiongkok yang berinvestasi namun tidak melibatkan tenaga kerja lokal, bahkan buruh pun ditransfer dari negara asalnya. Fadli tidak menghendaki hal demikian.

Terkait kerja sama dalam bidang pertahanan Fadli mengatakan, "Selain kerjasama investasi ekonomi, juga kerjasama di bidang pertahanan. Seperti Indonesia memesan tiga kapal selam, dan juga *jet fighter* dari Korea Selatan."

Fadli juga menunjukkan ketertarikan-

nya pada Saemaul Undong, yakni gerakan pembangunan pedesaan di Korea Selatan. Dia menghendaki agar pelatihan pembangunan pedesaan bisa juga ditularkan ke Indonesia.

Saemaul Undong merupakan gerakan perubahan dan reformasi pedesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. "Saya sarankan agar Korea Selatan membuka

Saemaul Undong di Indonesia," harap Fadli.

Terkait kerja sama dalam peningkatan bidang pertanian, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) priode 2010 - 2015 mengatakan, "Petani Indonesia belajar ke Korea, karena mereka selain produksi pasca produksi juga tinggi, mereka juga luar biasa memiliki teknologi pertanian." ■

(eko), foto: andri/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menerima kunjungan Ketua Asosiasi Persahabatan Anggota Parlemen Indonesia-Korea dan Ketua Komite Ekonomi Partnership



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.IIham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murtiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Wakil Ketua DPR Dorong Eksplorasi Energi Geothermal

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima kunjungan Atase Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Takashi Kitamura dan Direktur Japan International Cooperation Agency (JICA) Matsunoshita Minoru, membahas tentang masalah energi geothermal (energi panas bumi) dalam rangka pemenuhan kecukupan energi dalam negeri.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Kita ketahui kecukupan energi itu sampai saat ini belum kita dapatkan, kami berfikir bahwa sumber energi yang sekarang cadangannya cukup banyak dan belum dimanfaatkan adalah geothermal. Oleh karena itu Pimpinan Dewan Bidang Korinbang ingin mendorong supaya energi

geothermal dapat dieksplor dan dikuatkan," ujar Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/5).

Menurut Agus, Indonesia memiliki cadangan energi geothermal yang cukup banyak, dan energi geothermal ini adalah energi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan energi yang betul-betul kita miliki dengan memperhatikan lingkungan yang serba baik.

"Energi geothermal ini tidak ada habis-habisnya, panas bumi yang dihasilkan oleh gunung berapi, seperti ada magma dan terdapat lapisan batuan dan air di atasnya, maka akan menghasilkan uap, dan uap inilah yang akan menghidupkan pembangkit," jelasnya.

Energi tersebut akan terus bersikulasi, sehingga tidak mungkin merusak lingkungan dan energi itu tidak akan habis

karena yang digunakan hanya uapnya saja. Berbeda halnya dengan gas yang memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti peristiwa lapindo.

Kendala yang paling sulit dalam masalah ini adalah menemukan lokasi tempat titik pengeborannya, karena kandungan pusat uap di dalam lapisan bumi tidak selalu sama. Meskipun bisa dilihat dengan satelit namun setelah beberapa kali di coba, ternyata tingkat kepadatan uapnya masih kurang, sehingga harus pindah ke lokasi lain.

"Jelas hal ini mengandung resiko yang sangat tinggi, karena perlu dana yang besar untuk sekali tancap bor. Oleh sebab itu DPR ingin tahu bagaimana teknologi satelit yang dimiliki oleh Jepang untuk menentukan akurasi *hotspot* tersebut," tandas Agus. ■

(dep/mp), foto : kresno/hr

DPR Harap Revolusi Mental Jangan Hanya Sekedar Jargon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengharapkan konsep revolusi mental yang diusung Pemerintahan Jokowi tidak hanya sebagai jargon politik semata, melainkan mampu menghasilkan output yang jelas dan terukur.

Demikian diungkapkan politisi Gerindra ini saat menjadi salah satu *keynote speaker* dalam Creative Cultural Forum (CCF) Sastra UI yang bertemakan "Revolusi Mental": Sebuah Cara Memperbaiki Mentalitas Kebangsaan.

"Apa yang menjadi niat baik dalam revolusi mental terutama untuk perubahan karakter bangsa wajib kita dukung, tetapi konsepnya kan harus jelas. Kalau konsep saja tidak jelas, nanti program tidak jelas, implementasi apalagi," tegas Fadli saat



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

berbicara di depan forum CCF di Universitas Indonesia, Depok, Senin, (02/05).

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, bahwa ide revolusi mental yang diusung Pemerintahan Jokowi seharusnya dibenahi terlebih dahulu dari segi konsep, kemudian menentukan target dari revolusi mental sehingga tidak hanya menjadi sekedar jargon politik. "Revolusi ini mengarah pada perubahan karakter bangsa, jadi harus dibenahi konsepnya, apasih maunya revolusi mental itu," jelasnya.

Selain itu, alumni Sastra Rusia Universitas Indonesia ini, memberikan

beberapa catatan penting dengan mengambil perbandingan konsep Revolusi Mental ala Korea Selatan atau yang dikenal dengan Saemaul Undong. Saemaul Undong merupakan suatu gerakan perubahan dan reformasi pedesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Dijelaskannya, terdapat tiga *spirit* yang terkandung di dalam Saemaul Undong diantaranya kedisiplinan, kemandirian dan kerja sama yang diimplementasikan dengan baik hingga kini. "Semestinya orientasi kebijakan pemerintah memberi warna berbeda dari praktik yang sudah dijalankan

sebelumnya. Namun faktanya, operasionalisasi ide revolusi mental menghadapi hambatan yang sangat fundamental, yakni krisis figur di tataran elit negara," papar Fadli.

Menurut politisi dapil Jawa Barat V ini, persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini justru berkaitan dengan struktural matrealistis yang memerlukan perubahan dari tatanan tertinggi atau *revolution from above*. "Saya bukan seorang pesimis dan kita selalu mendukung niat baik, tetapi niat baik itu juga harus didukung oleh satu konsep yang jelas serta *output* yang terukur," ungkapnya. ■

(ann), foto hamdis/hr

Reformasi Setjen DPR Mengacu Pada Nawa Cita

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menegaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sudah semestinya mengacu pada Nawa Cita Pemerintah.



Suasana sosialisasi reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR

"Jadi *road map* reformasi birokrasi kita memang harus mengacu atau harus disesuaikan dengan Nawa Cita, yang merupakan sembilan agenda dari kabinet Presiden Jokowi dan JK," ujar Win, begitu biasa disapa, Rabu (11/16).

Win memaparkan, dari sembilan Nawa Cita Kabinet Kerja Pemerintah yang sangat signifikan terkait dengan tugas pelaksanaan Sekretariat Jenderal DPR adalah agenda nomor dua. Meski-pun demikian Win juga menyampaikan agenda Nawa Cita yang lainnya juga perlu dilakukan dengan serius.

"Yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya," ucap Win

saat sosialisasi reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR.

Win menjelaskan, harapan utama dari reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR adalah bagaimana substansi dari *road map* ini menjadi sebuah komitmen bersama. Komitmen yang kuat dari seluruh aparatur sipil negara untuk melakukan sembilan area perubahan.

"Jadi tidak hanya jargon saja, dilaksanakan dan diterjemahkan dalam tindakan kerja kita, kerja nyata yang pada akhirnya memberikan efek positif kepada *stakeholder* kita," ujarnya.

Sehingga dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR dapat

dirasakan kemajuan, peningkatan dukungan. "Dirasakan kualitas dukungan kita oleh *stakeholder* utama anggota dewan dan mitra serta seluruh pegawai kita," harap Win.

Sembilan program tersebut diantaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Selain itu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Selanjutnya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar". ■

(eko.mp), foto : azka/hr

Fasilitas Lapas Kelas II A Manado Tidak Manusiawi

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedyia Panjaitan menilai fasilitas Lapas Kelas II A Manado tidak manusiawi

Pasalnya, Ia menemukan adanya satu blok tahanan terpidana narkoba yang tidak memiliki kloset di dalam sel penjara.

"Saya melihat blok tersebut sudah tidak manusiawi, bahkan menurut saya hal ini sudah melanggar HAM. Ketika malam hari sel penjara dikunci, akibatnya kalau mau buang air kecil mesti dengan botol kemasan, jika buang air besar menggunakan plastik. Selain tidak layak, hal ini sudah pasti menimbulkan penyakit buat narapidana lain" kata Trimedyia saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi III DPR meninjau Lapas Kelas II A di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/5).

Ditambahkannya, ada salah satu ruangan yang dilewati agak bau, menurut Kepala Lapas sanitasi dan drainasenya bermasalah. Dari pengamatannya, kebersihan Lapas Kelas II A ini sudah cukup baik, namun sejumlah permukaan tembok pada beberapa bangunan, catnya tak pernah diperbaharui.



Tim Kunker Komisi III DPR saat meninjau Lapas Kelas II A di Manado, Sulawesi Utara

Selain itu, lanjut Trimedyia, Lapas kelas II A ini juga sudah *over* kapasitas, seyogyanya ditempati 400 warga binaan, tetapi saat ini dihuni 600 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas Lapas juga diakibatkan dengan berlakunya PP 99 tahun 2012, orang mau berbuat baik tidak ada harapan dapat remisi, sehingga penjara menjadi penuh.

"Kami sudah berdialog dengan Kakanwil Hukum dan HAM terhadap usulan renovasi Lapas ini. Kami akan perjuangkan anggarannya minimal pada APBNP 2016 dan maksimal di tahun 2017. Tapi saya pikir kalau dana yang

diperlukan tidak terlalu besar secepatnya bisa segera direalisasikan" jelas Politisi F-PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kakanwil Sulut, Sudirman Dahuri mengatakan, pihak Kantor Wilayah dan Lapas Kelas II A Manado pada tahun 2015 telah berupaya mengusulkan anggaran perbaikan terhadap beberapa gedung atau bangunan di Lapas tersebut ke Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan Dirjen

Pemasyarakatan. Namun ditahun 2016 usulan tersebut belum terealisasi. Yang ada hanya anggaran perawatan gedung Lapas yang terbatas.

"Kami mengajukan anggaran untuk renovasi Lapas Kelas IIA Manado sekitar tujuh miliar. Untuk itu, kami berharap kepada Komisi III DPR untuk memperjuangkan anggarannya" harapnya.

Hadir pula dalam peninjauan tersebut, Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio, Yayat Yulmaryatmo Biaro, Wenny Warouw, Ruhut Poltak Sitompul, Anarulita Muchtar. ■

(jaka) foto : iaka/mrc

Kalteng Berpotensi Kembangkan Wisata Alam dan Budaya

Komisi X DPR RI menilai Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai pusat wisata alam dan wisata budaya, sehingga dapat meningkatkan kedatangan wisatawan dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi X Asdi Narang menuturkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai keragaman budaya dan bahasa khususnya Dayak, serta alamnya yang masih alami membuat obyek wisata di sini lebih

menarik.

"Kami (Komisi X-red) melihat potensi Kalimantan Tengah seperti pariwisata dan sumber alamnya yang sangat potensial, dan juga hutan-hutannya yang masih alami," kata Asdi Narang, saat memimpin

Tim Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Senin (2/5).

Menurutnya, hal ini juga yang membuat Komisi X memilih provinsi ini sebagai fokus kunker, salah satunya karena

Kalimantan Tengah memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa, dan ingin memperjuangkan Kalimantan Tengah untuk menjadi provinsi yang maju bersama provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Provinsi Kalimantan Tengah juga

memiliki potensi-potensi alam yang dapat diperkenalkan kepada dunia Internasional seperti aliran sungai yang panjang dan lebar yakni Sungai Kahayang, yang dapat menarik perhatian dan mengundang datangnya wisatawan dari dalam dan luar negeri.

"Sumber daya manusianya dapat dilatih dan diberdayakan sehingga dalam lima



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat kunjungi Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya

tahun kedepan, Kalimantan Tengah dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan bagi Indonesia," tuturnya.

Untuk itu, agar tujuan ini dapat tercapai maka perlu adanya sinergis antara Pemerintah Daerah di Kabupaten, Kota dan Provinsi dengan Pemerintah Pusat, untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pusat wisata alam yang

dapat mengundang wisatawan dari luar negeri lebih banyak lagi.

Dengan adanya kerjasama tersebut, Komisi X mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan yang lebih besar kepada Kalimantan Tengah, Karena kami melihat Kalimantan Tengah ini merupakan kunci wisata alam yang belum tersentuh, maka untuk mewujudkan hal ini diperlukan anggaran dari

Pemerintah Pusat.

"Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah pusat perlu menggelontorkan anggaran untuk mengembangkan budaya Kalimantan Tengah," tegasnya. ■

(es), foto : Agung/hr.

RUU PIHU Lindungi Kepentingan Jemaah

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) dirumuskan untuk melindungi kepentingan jemaah haji Indonesia. RUU ini menjadi payung bagi semua calon haji maupun yang sedang berhaji.



Anggota Komisi VIII DPR RI Anda dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Anda, Selasa (10/5), di Media Center dalam diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU PIHU. Hadir pula sebagai pembicara Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Samidin Nasir dan Ketua Umum Rabitah Haji

Indonesia Ade Marfuddin.

RUU PIHU, kata Anda, merupakan revisi atas UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam RUU PIHU peran regulator dan operator haji akan semakin diperjelas. "RUU kelak bisa

memayungi jemaah haji agar lebih tenang dalam beribadah," tegasnya dalam diskusi tersebut.

Dijelaskan politisi Partai Gerindra itu, dalam pengelolaan dana haji ada yang disebut *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan beban biaya yang harus ditanggung jemaah untuk berhaji.

Sementara *indirect cost* merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan haji. Biaya terakhir ini diambil dari bunga simpanan haji jemaah yang sekarang mencapai Rp3,9 triliun.

Harus ada manfaat yang kembali dirasakan jemaah usai berhaji. Dan manfaat itu bisa diusahakan pemerintah dari *indirect cost* tersebut. Sementara itu, Ade Marfuddin menyambut baik pembahasan RUU ini oleh Komisi VIII DPR. Ada kritik yang disampaikan dalam penyelenggaraan haji selama ini. Badan penyelenggara haji yang menjadi amanat UU No.13/2008 untuk dibentuk, ternyata belum pernah dibentuk.

Ini artinya, pemerintah dinilai belum siap menyelenggarakan haji. Selain itu, manfaat dari pengelolaan dana haji belum maksimal diberikan kepada para jemaah pasca berhaji. Di Malaysia, lanjutnya, semua jemaah selalu diberikan laporan keuangan yang lengkap usai berhaji. Ini harus menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan dana haji di Tanah Air. ■

(mh), foto : jake/hr.

Minat Naik Haji Di Aceh Tinggi, Kuota Tak Kunjung Bertambah

Tingginya minat masyarakat Aceh untuk menunaikan ibadah haji belum bisa diakomodir akibat masih belum bertambahnya kuota haji yang diperoleh.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh yang diwakili Asisten II Sekda Aceh H. Azhari Hasan dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Syahrul Badruddin, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Kadis Sosial Aceh, Kepala BPBD Aceh, Kabiro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Ketua Bazda Aceh, Tim pendamping dari mitra Komisi VIII DPR RI serta tokoh masyarakat di Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/5).

Menjawab hal tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI H.D. Sodik Mudjahid dalam sambutannya menegaskan setelah melalui rapat-rapat kerja dengan jajaran Kemenag dan pihak terkait akan ada banyak peningkatan pelayanan yang diberikan kepada semua jemaah haji tahun 2016 ini.

"Antara lain memberikan jatah makan 24 kali selama di Mekkah dibandingkan tahun 2015 lalu hanya 15 kali. Menambah layanan bis shalawat dengan rasio 91 persen dari jumlah jemaah dibandingkan tahun lalu hanya sebanyak 80 persen," ungkap politisi Gerindra ini.

Pihak penyelenggara haji juga akan menambah frekuensi manasik haji sesuai dengan aspirasi masyarakat (jemaah) serta peningkatan kualitas pelayanan bis antar kota agar tidak terulang lagi kasus bis mogok.

Yang tak kalah pentingnya, politisi

Dapil Jabar I ini mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR baru saja merampungkan pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 1437 H/2016 M dengan hasil penurunan BPIH senilai 132 dollar (dari 2.717 dollar menjadi 2.585 dollar) atau dalam rupiah setara Rp. 34.641.304.

"Untuk tahun ini BPIH 2016 akan diumumkan dalam mata uang rupiah sehingga masyarakat (Jemaah-red) mendapatkan kepastian dalam pelunasannya. Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama RI sepakat BPIH hanya dipatok dalam mata uang rupiah dan Saudi Arabia Riyal (SAR)," papar Sodik.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Aceh, HM, Daud Pakeh tetap berharap memperoleh penambahan kuota haji untuk Aceh, mengingat bahwa *waiting list* (daftar tunggu-red) haji Aceh saat ini mencapai sekitar 24 tahun.

"Kuota haji Aceh saat ini hanya sekitar 31 ribu jemaah, sementara normalnya dulu mencapai 38 ribu sehingga potensi penumpukan daftar tunggu jemaah kian membengkak," ujar Daud.

Masalah lainnya adalah faktor usia lanjut dari mayoritas pendaftar calon jemaah haji di Aceh menjadi sangat riskan dari sisi fisik (tingkat kesehatan) maupun pemahamannya tentang manasik haji.

"Karena sudah usia lanjut maka diperlukan penanganan khusus dan butuh pendampingan dari petugas haji yang lebih muda, bahkan mereka kerap kesulitan

memahami manasik haji," terang Daud Pakeh.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengakui untuk tahun 2016 ini belum bisa memperoleh tambahan kuota haji, walaupun segala upaya pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi sangat intens dilakukan.

"Komisi VIII DPR bahkan mengundang Dubes Indonesia untuk Arab Saudi untuk membantu proses lobi penambahan kuota, namun hasilnya belum menggembirakan dan kita masih harus bersabar," jelas Sodik.

Usai pertemuan dengan Perwakilan Gubernur Aceh dan jajaran SKPD, Komisi VIII DPR RI secara simbolis menyerahkan bantuan dari Kemenag RI senilai Rp 3,5 miliar, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) Provinsi Aceh dari Kemensos RI senilai Rp 1,3 miliar untuk 387 orang dan Dana Dekonsentrasi Kemen PP dan PA untuk Provinsi Aceh senilai Rp 616 juta.

Ikut dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua Tim Sodik Mudjahid (Wakil Ketua-Gerindra), Ledia Hanifa Amaliah (Wakil Ketua-PKS), Firmandez (Golkar), Agus Susanto (PDIP), Alfian Reziani (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Mhd. Asli Haidir (PAN), Kuswiyanto (PAN), Maman Imanul Haq (PKB), Iskan Qolba Lubis (PKS), Achmad Fauzan Harun (PPP), dan Choirul Muna (Nasdem). ■

(jiji) foto : odjie/hr



Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI saat pertemuan di Kantor Gubernur Aceh

Anggota DPR Andi M. Ghalib Meninggal Dunia

Anggota Komisi I DPR RI Andi Muhammad Ghalib wafat pada Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Almarhum adalah Anggota Fraksi PPP dari dapil Sulsel II. Kabar wafatnya Andi Ghalib didapat Parlemen pada Senin pagi ini (9/6).

Beberapa hari terakhir sebelum wafat, Ghalib kerap hadir di DPR untuk mengikuti rapat paripurna. Walau sering duduk di kursi roda, ia tetap mengikuti agenda penting rapat. Ghalib sempat dirawat di RS Medistra Jakarta Selatan. Almarhum meninggalkan satu istri dan empat anak. Lahir di Bone, 3 juni 1946, Ghalib sudah dua periode menjadi anggota DPR. Periode pertamanya pada 2004-2009. Lalu, ia sempat menjadi diplomat di India hingga tahun 2013.

Pada pemilu 2014, ia kembali terpilih menjadi legislator untuk periode 2014-2019. Ghalib juga dikenal sebagai mantan Jaksa Agung pada 1998-1999. Berlatar pendidikan militer AD dengan pangkat terakhir Letjen, Ghalib pernah mendapat bintang penghargaan, yaitu Bintang Dharma RI, Bintang Pratama RI, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Satya Lencana Penegak, dan Satya Lencana Dwyasista.

Almarhum disemayamkan di rumah duka di kawasan Cipayung Jakarta Timur, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. ■



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Almarhum Andi Ghalib, Lambang Keberhasilan Transformasi TNI ke Politisi

Barisan karangan bunga duka cita serta ratusan pelayat dari berbagai instansi dan lembaga tinggi negara hadir untuk memberikan do'a dan ucapan belasungkawa di rumah duka almarhum Andi Muhammad Ghalib, anggota Komisi I DPR RI yang wafat pada Senin pagi (9/5) pukul 06.00 WIB setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan ucapan rasa belasungkawa yang dalam atas berpulangnya almarhum Andi M. Ghalib. Ia juga menuturkan tentang kepribadian almarhum Andi Ghalib, yang menurutnya pantas untuk dijadikan contoh dan panutan bagi generasi selanjutnya.

"Beliau adalah lambang keberhasilan transformasi seorang anggota TNI menjadi politisi yang baik. Dan yang paling mengesankan dari sosok almarhum adalah tentang kepedulian dan perhatiannya kepada seseorang. Di mata rekan-rekannya, sosok almarhum Andi Ghalib bukan saja sebagai kolega di DPR, tapi beliau juga seorang bapak dan senior, yang bisa

menjadi mentor dan menjadi contoh buat kita," ujar Arsul Sani di rumah duka kediaman almarhum di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (9/5).

Arsul juga mengatakan bahwa, almarhum sudah lama menderita sakit, tapi beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR, meskipun harus dengan menggunakan kursi roda, aktif mengikuti persidangan-persidangan, padahal sudah disarankan supaya beliau istirahat.

"Saya punya keyakinan bahwa dia adalah orang baik dan Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Karena dalam dua kali masa sidang kita bertemu, beliau selalu pegang

tangan saya dan mengatakan tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada semua teman-teman baik yang di DPR maupun yang di luar, tampaknya saya tidak akan lama lagi, dan saya tidak sempat ketemu semua orang. Itu merupakan suatu tanda bahwa orang yang meninggal dengan kebaikan," ucap politisi F-PPP tersebut.

Hal lain yang bisa dipelajari dari almarhum Andi Ghalib, lanjut Arsul, almarhum seorang yang tegas, tapi lembut. Tapi kalau sudah punya pendirian dia akan mempertahankannya, namun tetap dengan cara yang lembut, bukan dengan cara marah atau memojokkan pendapat yang berbeda. ■

Pendidikan di Jambi Masih Butuh Pembenahan Besar-besaran

Komisi X DPR dalam kunjungan kerjanya ke Jambi menggelar pertemuan dengan Gubernur Jambi beserta jajarannya serta dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Jambi, Selasa (3/5).

Pertemuan tersebut membahas pembangunan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait bidang pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, pustaka dan ekonomi kreatif.

Gubernur Jambi Zumi Zola dalam paparannya menyampaikan gambaran umum beberapa permasalahan di Provinsi Jambi terutama dalam sektor pendidikan diantaranya, keterbatasan infrastruktur pendidikan dan tenaga guru.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam paparannya menyampaikan bahwa ada sekitar 30 % anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani pendidikan PAUD. Sementara ada 0,25 % yang belum memperoleh layanan SD, 3 % belum memperoleh layanan SMP dan 16,80 % belum memperoleh layanan SMA.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X Elviana meminta data yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan dari sektor pendidikan di Jambi terutama kekurangan-kekurangan tenaga guru di setiap sekolah yang ada di Jambi.

Menurut Elviana, angka 30 % atau 76.602 penduduk Jambi yang belum terlayani pendidikan PAUD ada 31.962 penduduk Jambi yang belum memperoleh layanan SMA ini cukup memprihatinkan sekali. "Saya minta data sebaran yang riil, karena 30 % dan 16,80 % itu angka yang sangat tinggi, saya maunya data perkabupaten," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dari Dapil Jambi tidak



Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra berdiskusi dengan Gubernur Jambi

menampik bahwa pendidikan di Provinsi Jambi sampai saat ini masih membutuhkan pembenahan besar-besaran.

"Ke depan Komisi X akan meminta pemerintah pusat bisa memberikan dana segar yang cukup dari APBN untuk Provinsi Jambi, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan," ungkap Sutan atau akrab disapa SAH.

Lebih lanjut SAH menyampaikan, melalui Komisi X akan memperjuangkan permasalahan yang disampaikan Gubernur Jambi maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Melalui Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi X terutama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal permasalahan pendidikan di Jambi.

Namun, SAH berharap pemkab/kota di Provinsi Jambi juga mampu mengatasi beberapa permasalahan yang disampaikan tadi dapat diselesaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

"Ya tidak semua permasalahan yang ada di Jambi diserahkan ke pemerintah pusat, Pemkab/kota di Provinsi Jambi harus

belajar bagaimana menyelesaikan persoalan yang kecil," harap SAH.

Beberapa anggota Komisi X lainnya juga mempertanyakan bagaimana penanganan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, karena menurutnya keluhan yang disampaikan tadi masih belum jelas apakah sudah

tertangani atau belum. "Masalah sarana dan prasarana apakah sudah ditangani Pemkab atau belum. Jadi jangan semua permasalahan di ungkapkan disini. Kalau bisa diselesaikan sendiri kenapa harus dibawa ke meja rapat," ungkap Dadang Rusdiana.

Anggota Komisi X My Esti Wijayati mengatakan, data kasar yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jambi terkait kondisi pendidikan memang harus menjadi tugas bersama sama dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

"Kalau saya melihat data nasional, sepertinya angka kasar ini menjadi PR kita ketika, secara nasional tahun 2019 angka partisipasi kita harus mencapai 90 persen. Jadi ketika Jambi belum mencapai target kita perlu sinergi dan prioritaskan. tetapi sinergitas kabupaten kota dan kementerian perlu kita tingkatkan. Saya berharap menjadi penyokong Jambi untuk lebih maju," ungkapnya. ■

(skr), foto : singgih/hr

Komisi X Sayangkan Menurunnya Kunjungan Wisata ke Bantimurung

Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 Komisi X DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja ke tiga Provinsi yaitu Prov. Sulsel, Kalteng dan Prov. Jambi.

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya, memimpin langsung kunker ke Provinsi Sulawesi Selatan didampingi 17 anggota diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latif, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel di Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar, Rabu (4/5). Sekda mewakili Gubernur Sulsel, karena Gubernur Syahrul Yasin Limpo tengah bertugas ke Luwu Timur.

Seusai pertemuan, rombongan Komisi X DPR langsung menuju Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Kabupaten Maros. Taman Nasional Bantimurung merupakan salah satu obyek wisata alam yang potensial karena memiliki kawasan Karst seluas 43.750 hektare, memiliki flora fauna endemik, memiliki koleksi 247 jenis kupu-kupu.

Selain itu, memiliki 709 jenis flora, 730 jenis fauna dan 52 jenis diantaranya dilindungi undang-undang, serta memiliki 154 jenis burung. Disamping itu di Taman Nasional Bantimurung ini juga memiliki 216 gua alam dan 41 gua pra sejarah.

Menurut Politisi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dalam konteks

kepariwisataan, Taman Nasional Bantimurung saat ini memiliki permasalahan yaitu menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara atau domestik. Khususnya wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan sebesar 80 %. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014 tiket masuk bagi wisatawan mancanegara dinaikkan dari Rp.50.000 menjadi Rp.255.000. Pengelola mengharapkan agar tiket masuk bagi wisatawan mancanegara dapat diturunkan kembali setidaknya sebesar Rp.75.000.

"Inilah hasil temuan tim kunker Komisi X DPR. Kami berharap rekomendasi dari Komisi X DPR RI akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam membenahan beberapa tujuan wisata di Provinsi Sulsel. Kami juga minta penda memperhatikan fasilitas akses menuju lokasi tujuan wisata," katanya

Anggota Komisi X Laila Istiana dari Fraksi PAN mengomentari, dengan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Bantimurung, ternyata tidak membawa perubahan apapun. Hal itu bisa dilihat saat Komisi X meninjau langsung kondisi di lapangan bahwa Taman Nasional ini

memang tidak layak dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana maupun infrastruktur.

Ia juga menyayangkan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat kurang terutama untuk promosi wisata bagi wisatawan mancanegara dan lokal.

Seusai mengunjungi Taman Nasional, Tim Komisi X melanjutkan tinjauannya ke Koperasi Syariah Pakkamase yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang antara lain memproduksi berbagai produk industri kreatif yaitu kerajinan akrilik dan kain perca.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari bahwa, koperasi ini dalam perjalanannya masih membutuhkan bantuan modal. Komisi X DPR berpandangan bahwa industri kreatif seperti ini patut untuk dikembangkan karena mampu mendorong dan menggerakkan ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang dengan positif dan produktif.

"Bahwa dengan modal atau belanja barang Rp. 5.000.000 dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 dengan kata lain, keuntungan yang didapatkan sebesar 100% lebih dan kami sangat *support* keberadaan koperasi ini dengan memberikan dana pinjaman melalui koperasi induk", kata Abdul Kharis. ■

(hr), foto : eka hindra/hr.



Tim Kunker Komisi X DPR saat tinjau Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Kabupaten Maros

Legislator Berharap UN SMP Diwarnai Semangat Kejujuran

Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP dan sederajat telah dimulai per Senin (9/5), dan akan berakhir pada Kamis (12/5).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra berharap, UN SMP tahun ini diwarnai dengan semangat kejujuran dari seluruh peserta UN SMP dan sederajat.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

"Semoga keberhasilan menyertai adik-adik

yang sedang menempuh UN SMP dan sederajat. Saya berharap seluruh siswa dapat menyelesaikan UN dengan baik, dan berbasis semangat kejujuran dalam meraih prestasi," kata Sutan, dalam pres rilis yang diterima Parlemen, Senin (9/5).

Dalam rilisnya, politisi F-Gerindra ini mengingatkan peserta UN SMP dan sederajat agar menyiapkan diri dalam menghadapi UN 2016. Diantaranya dengan mempelajari kisi-kisi standar kompetensi kelulusan (SKL) UN 2016 dengan banyak berlatih soal UN, serta mempelajari teknik pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Juga jaga perasaan agar tetap tenang, hindari bentuk pelanggaran apapun, dan periksa ulang data diri dan jawaban," imbuhi Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini menambahkan, prestasi adalah sesuatu yang penting bagi seorang pelajar, karena menyangkut masa depan bagi pelajar itu sendiri. Ia menegaskan, kejujuran merupakan suatu keharusan, karena menyangkut kualitas pribadi.

"Pelajar saat ini adalah generasi muda yang membanggakan, maka raihlah prestasi dengan kejujuran dalam mengikuti UN," tegas politisi yang akrab dipanggil SAH ini.

Apalagi, tambah Sutan, indeks integritas kejujuran merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kelulusan, salah satu caranya dengan penerapan UNBK.

UN tingkat SMP dan sederajat akan diikuti oleh lebih dari 4,2 juta siswa. Rinciannya, sebanyak 4,2 juta siswa akan mengikuti UN dengan sistem Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP), di 59 ribu sekolah. Sementara, UNBK akan diikuti oleh 156 ribu siswa di 984 sekolah. ■

(sf), foto: sofyan/hr

Tujuan PMPRB Untuk Perbaiki Lembaga Berkelanjutan

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada pejabat-pejabat di lingkungan Setjen DPR.

Menurutnya, penilaian terhadap kinerja lembaga bertujuan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Toto, begitu dia biasa disapa, memaparkan PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri, mencakup penilaian terhadap dua komponen pengungkit dan hasil. "Pada prinsipnya penilaian ini untuk perbaikan yang berkelanjutan," paparnya, di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (11/5).

Hal tersebut disampaikan saat acara sosialisasi hasil PMPRB instansi dan rencana aksi 2016. Toto mengungkapkan, perbaikan berkelanjutan merupakan hasil penilaian yang digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi



Irtama Setjen DPR Setyanta Nugraha didampingi Sekjen DPR

birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta melakukan perbaikan kinerja.

Toto juga memaparkan pengungkit yang disebutkan di atas adalah, seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan

fungsinya. "Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi," ungkapnya.

Sedangkan hasil, menurutnya adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Toto melanjutkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan prinsip penilaian juga harus menjunjung asas kejujuran. Menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi senyatanya dalam praktik.

Terkait dengan rencana aksi 2016, Toto membeberkan beberapa poin penting. Yakni antara lain, penetapan religius, akuntabel, profesional, dan integritas disingkat menjadi RAPI, poin-poin tersebut sebagai budaya unggulan dalam lembaga. ■

(eko.mp) fotocakra/hr

Kanwil Kemenag Papua Barat Kekurangan PNS

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di Provinsi Papua Barat sangat kekurangan tenaga PNS. Moratorium PNS yang kini masih diberlakukan perlu dibuka khusus untuk Papua Barat.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Kanwil Kemenag Papua Barat, Senin (2/5). Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti yang ditemui usai pertemuan di Manokwari, mengatakan, "Untuk Papua Barat



Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti

mestinya ada kelonggaran khusus, agar PNS-nya lebih banyak untuk mengurangi beban kerja yang juga berat."

Kekurangan PNS di Kanwil Kemenag Papua Barat, sambung politisi Partai Golkar itu, berdampak cukup luas. Kekurangan tenaga penyuluh agama atau rohaniawan sangat jelas terlihat. Banyak rangkap jabatan dilakukan, karena kekurangan PNS. Padahal, keberadaan penyuluh agama sangat penting untuk membendung kasus-kasus KDRT di Papua Barat.

"Mengapa banyak kasus kekerasan seksual di Papua Barat, itu salah satunya adalah kekurangan tenaga penyuluh di Kanwil Kemenag. Untuk itu, Kemenag pusat harus mendorong agar Papua Barat diberi kelonggaran dibanding daerah lain dalam menerima PNS baru. Dengan begitu

pemahaman agama masyarakatnya bisa jauh lebih baik dengan penambahan tenaga penyuluh agama," harap Endang.

Politisi dari dapil Jateng IV ini menyerukan agar pemahaman agama yang holistik harus masif dilakukan kepada masyarakat di Papua Barat. Itulah tugas para penyuluh agama setempat. Apalagi, penggunaan miras di tengah masyarakat masih cukup tinggi. Lagi-lagi ini tugas para penyuluh agama di Papua Barat untuk menegakkan aturan pelarangan miras.

Sebelumnya, kondisi kekurangan tenaga PNS juga sudah disampaikan Kabag TU Kanwil Kemenag setempat. Katanya, banyak jabatan kosong yang terpaksa dirangkap oleh satu pegawai. PNS-terus berkurang, karena pensiun, wafat, dan mutasi antar instansi. Sementara saat yang sama masih ada moratorium PNS. ■

(mh) foto: husen/hr

DPRD Nias Konsultasikan Penyusunan Perda dengan Badan Keahlian DPR

Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan DPRD Kabupaten Nias. Dalam diskusi ini BK Dewan menyoroti mengenai fungsi legislasi DPRD dan teknik penyusunan peraturan daerah (legal drafting)

Kepala Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk menjelaskan kehadiran DPRD Nias untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugasnya terutama yang berkaitan dengan inisiasi perancangan peraturan daerah.

"Mereka menanyakan mekanisme penyusunan perencanaan pembentukan Perda sesuai dengan materai peraturan agar inisiasi yang dihasilkan berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujar Johnson, di gedung DPR Senayan, Selasa (10/5).

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai bagaimana hal ini dituangkan mulai dari program legislasi daerah atau yang sekarang disebut sebagai program pembentukan peraturan daerah, sampai ke dalam

penyusunan naskah akademiknya, kemudian dari sana akan mengalir dengan draf awal rancangan Perda.

Ketua DPRD Kabupaten Nias, Yaredi Laoli mengucapkan terimakasih kepada Badan Keahlian DPR RI yang telah membuka wawasan terkait dengan produk-produk hukum yang akan dirancang sesuai dengan tupoksi di alat kelengkapan dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

"Masukan dari Kepala BK Dewan akan menjadi penguatan bagi kita dalam membuat suatu Perda agar peraturan yang dihasilkan dapat memenuhi syarat dan secara *legal standing*nya diakui dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, diskusi



Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk

ini juga dilatarbelakangi banyak perda yang dianulir karena tidak sesuai dengan ketentuan maka dari itu DPRD Nias terus mengambil inisiatif untuk berkonsultasi, agar Perda yang dihasilkan tidak dianulir oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Supaya pekerjaan kami tidak sia-sia, karena dalam membuat Perda dananya tidak tanggung-tanggung. Kami tidak mau hasil itu sia-sia dan dapat merugikan negara dan daerah, makanya kami sangat hati-hati," kata Yaredi Laoli. ■

(rmm,mp), foto: Jayadi/hr

BKD dan DPR DIY Bahas Tiga Poin Inti

Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dalam diskusi dua institusi ini menyoroti tiga poin inti.

Yakni Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penguatan sistem pendukung kelembagaan, serta sistem penganggaran program kegiatan.

Kepala Badan Keahlian Dewan, Johnson Rajagukguk menjelaskan, unsur yang menjadi fokus dari Prolegnas yang dibahas dalam pertemuan ini, terkait dengan indikator yang menjadi dasar penyusunan legislasi.

"Yang pertama tentang program legislasi nasional, bagaimana penyusunan dan penetapan program legislasi nasional di DPR. Serta indikator-indikator yang perlu menjadi bahan dalam penyusunan legislasi," papar Johnson, di Gedung DPR Senayan, Selasa (10/5).

Menurutnya, dalam menginventarisir indikator dalam penyusunan Prolegnas merupakan tahapan kerja yang penting bagi DPR. "Kalau di daerah ada program legislasi daerah, tapi sekarang berubah menjadi program pembentukan peraturan daerah," ujar Johnson

Dia juga mengungkapkan, pemikiran-



Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk

pemikiran dalam pembentukan Prolegnas jika diadopsi dalam penyusunan peraturan daerah, tidak akan berlawanan prinsip, bahkan ada kesamaan.

"Untuk memasukkannya dalam program legislasi atau program pembentukan peraturan daerah pada prinsipnya ada kesamaan," kata Johnson.

Di sisi lain Ketua DPRD Yogyakarta, Yoeke Indra Agung Laksana menjelaskan,

kunjungan ini untuk mempersiapkan program pembentukan peraturan daerah. Karena, menurutnya peraturan daerah harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Hal tersebut dilakukan agar terjadi penyesuaian antara aturan daerah dengan aturan yang ada di pusat.

"Kita juga menggali hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di daerah dengan merujuk dinamika yang terjadi di pusat," papar Yoeke.

Berkenaan dengan penguatan sistem pendukung kelembagaan, menurut Johnson ada dua sistem pendukung, pertama Sekretariat Jenderal dan yang kedua Badan Keahlian Dewan.

"Nah di DPRD juga tentu sama dalam rangka memperkuat, perlu didukung oleh tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mendukung fungsi-fungsi DPRD," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut BKD DPR RI dan DPR DIY juga membicarakan sistem penganggaran, guna mendukung kelancaran tugas baik itu pada dewan maupun sistem pendukung yang ada dalam lembaga tersebut. ■

(eko), foto:risika/hr.



Anggota Komisi I DPR Djoko Udjiyanto

Legislator Desak Pemerintah Selamatkan 4 WNI

Terdapat simpang siur informasi terkait proses penyelamatan 10 anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mulai dari siapa yang paling berperan hingga apakah menggunakan uang tebusan atau tidak.

Komisi III DPR RI Soroti Pemindahan Napi

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai perpindahan narapidana antar lapas adalah langkah yang cuma-cuma dalam menindaklanjuti *over capacity* juga kericuhan di dalam lapas, mengingat narapidana yang dipindahkan ke Lapas yang satu dengan yang lainnya dengan kondisi yang sama, yaitu *over capacity*. Oleh karenanya Bambang menilai langkah tersebut tidak efektif.

Bambang juga mengatakan hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia dalam kondisi yang berlebihan, ini bukan disebabkan oleh tidak adanya keinginan dari pemerintah maupun DPR untuk membangun Lapas yang baru, mengingat dana pembangunannya sangatlah mahal.

"Ini kan menyangkut soal anggaran, karena membangun lapas itu biayanya tidak murah, sangat mahal, dan yang lebih mahal lagi adalah para penjaganya. Kan sekarang kebijakan Presiden Jokowi itu tidak ada pembangunan gedung baru, tidak ada penambahan pegawai baru, jadi *zero growth*," ucapnya usai dirinya bersama dengan anggota Tim Kunker Komisi III DPR meninjau Lapas Mataram, NTB, Senin, (2/5).

Anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar mengatakan, pemindahan napi yang dilakukan oleh Kemenkumham yang semula bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali kerusuhan antar napi di dalam Lapas, Dossy menilai hal tersebut merupakan ikhtiar dari pemerintah dalam

hal ini, Kemenkumham terkait upaya pendistribusikan para napi agar tidak timbul kerusuhan kembali.

Namun, Dossy berpendapat hal yang dilakukan oleh Menkumham belum substantif, yang utama menurutnya adalah melatih unsur ke lembaga pemasyarakatan, dimulai dari pimpinan hingga penjaga Lapas untuk dapat memberikan pelayanan dan pembinaan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab tanpa pilih kasih.

"Mengepankan unsur pembinaan ini kalau dibiarkan liar, dibiarkan ada ketidakadilan disana, yang satu diberikan fasilitas lebih yang satu tidak. Ini sebenarnya jadi pemicu. Nah karena itu unsur pembinaan dan prinsip pengelolaan yang adil di setiap Lapas ini menjadi sangat penting menurut saya," pungkas Dossy.

Tim Kunker Komisi III DPR

yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo diikuti pula oleh Dwi Ria Latifa, Adies Kadir, Iwan Kurniawan, Wihadi Wiyanto, I Putu Sudiartana, Tjatur Sapto Edy, Muhammad Thoha, Tb. Soemandjaya, Aditya Mufti Arifin, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar. ■

(foto) foto : Nadya/mr.



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR Djoko Udjiyanto mengatakan tidak mau berpolemik terkait hal tersebut. Menurut Politisi Partai Demokrat ini yang terpenting adalah 10 WNI yang disandera telah kembali dengan selamat. "Saya sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintah dan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebasan sandera 10 WNI," ujar Djoko.

Terkait siapa yang paling berperan atau bagaimana prosesnya, Djoko mengatakan itu bukan masalah utama. "Yang paling utama adalah rakyat ingin melihat apakah negara hadir dan mampu melindungi keselamatan rakyatnya atau tidak," papar Djoko.

"Sekarang pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah bagaimana menyelamatkan 4 WNI yang masih disandera dan nasibnya belum jelas," sambungnya.

Empat WNI tersebut adalah ABK Kapal Henri yang menarik kapal tongkang Christi yang disergap dan disandera oleh kelompok yang juga berafiliasi dengan Abu Sayyaf. Kapal itu dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pembajakan terjadi pada Jumat 15 April 2016 sekitar pukul 18.31 WIB.

Djoko mengingatkan bahwa

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah kewajiban negara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. "Ingat ya satu orang WNI yang terancam hidupnya di luar negeri itu sudah terlalu banyak, apalagi 4 orang WNI. *One is too many*," kata Djoko.

Negara harus mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk menyelamatkan empat sandera tersebut. Karena itu Djoko mendesak Kemlu sebagai *leading sector* perlindungan WNI di luar negeri agar semakin intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mitranya di Filipina. ■

(hs), foto : anarif/hr

PMPRB di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 2016

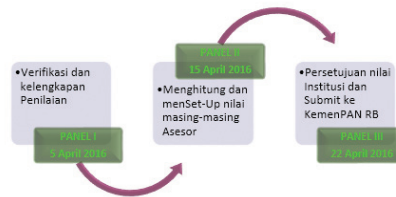
Inspektur Utama selaku Koordinator Asesor bersama dengan para Asesor di Unit Kerja Eselon I Badan Keahlian, Deputy Persidangan, Deputy Administrasi, dan Inspektorat Utama telah melakukan penilaian mandiri terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR tahun 2015.

Penilaian meliputi 2 (dua) komponen, yaitu Komponen Pengungkit (Enablers), seluruh upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam menjalankan fungsinya yang sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, dan Komponen Hasil (Results) adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit yang berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Penilaian komponen Pengungkit meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM ASN; Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sementara itu Komponen Hasil meliputi 3 (tiga) area,

yaitu Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi; Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan penilaian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan atau Panel. Panel I merupakan kegiatan Verifikasi dan kelengkapan penilaian, terutama eviden



atau bukti yang dilakukan para Asesor di unit kerja eselon I. Panel II adalah menghitung dan menSet-up nilai masing-masing Asesor bersama dengan Inspektur Utama. Hasil penilaian merupakan kesepakatan di tingkat Asesor/Inspektorat Utama selanjutnya di Submit kepada



Irtama DPR Setyanta Nugraha

Sekretaris Jenderal secara on line. Tahapan terakhir dalam kegiatan penilaian mandiri ini adalah pada Panel III, yaitu persetujuan hasil penilaian Asesor oleh Sekretaris Jenderal menjadi penilaian institusi.

Setelah melalui tahapan pembahasan yang disertai dengan eviden atau bukti-bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun ini adalah 85,37 % yang telah di Submit secara on line ke PMPRB Resource Center Kementerian PAN dan RB pada tanggal 22 April 2016. Bobot nilai tersebut diinterpretasikan "Memuaskan" dengan predikat "A" yang tentunya secara final apakah nilai tersebut tetap, turun atau naik setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB pada sekitar bulan Juni mendatang. ■

Inspektorat Utama DPR Launching E-LIT

Inspektorat Utama (Irtama) DPR *melaunching* sebuah aplikasi baru bernama E-learning Inspektorat Utama atau yang disingkat E-LIT

Aplikasi ini merupakan sarana untuk berbagai pengetahuan dan ilmu yang berkenaan dengan pengawasan internal terutama meningkatkan kapabilitas auditor.

"Alhamdulillah pada hari ini, kita melakukan soft launching E-learning Inspektorat Utama dan program pelatihan mandiri terutama yang berkaitan dengan tata cara E-LIT," sambut Irtama DPR, Setyanta Nugraha, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Rabu (04/05/2016).

E-learning sebuah sistem yang



Irtama DPR Setyanta Nugraha saat launching E-learning

menyediakan media pembelajaran online dan mandiri di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Dengan adanya e-learning ini maka bagi para auditor yang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan wajib menyampaikan materi pendidikan dan pelatihan itu untuk e-learning dan PPM

sehingga materi pelatihan tersebut bisa di-share kepada seluruh editor melalui web sehingga tidak terbatas waktu, tempat dan lain sebagainya.

"Golnya dengan harapan bisa meningkatkan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah ini yang sekarang di

Inspektorat Utama itu adalah level 1, dimana pada tahun 2019 amanat Presiden untuk bisa menaikkan level menjadi 3, secara nasional untuk auditor, pengawas pemerintah itu memang saat ini 84 % pada level 1. Kemudian 14% level 2 dan level 3 itu baru ada 1%. Kita termasuk yang diminta untuk meningkat menjadi 3%," papar Setyanta. ■

DPR Harapkan Ada Stasiun KA Singgah Bandara Kualanamu - Medan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Provinsi Sumatera Utara Muhidin M. Said mengharapkan agar dibuatkan stasiun-stasiun persinggahan bagi kereta api rute Bandara Kualanamu-Medan.



Tim Kunker Komisi V DPR saat tinjau penggunaan double track kereta api Bandara Kualanamu-Medan

Saya melihat keberadaan kereta ini masih ada sedikit *problem*," kata Muhidin disela-sela peninjauan penggunaan *double track* kereta api Bandara Kualanamu-Medan di Medan Sumatera Utara, Senin (2/5).

Problemnya itu, sambung politisi Partai Golkar ini, karena tidak ada stasiun-stasiun

persinggahan. Jadi yang ada hanya dari Bandara Kualanamu ke Medan.

Hal ini menyebabkan, tegas Muhidin, masyarakat yang memanfaatkan transportasi ini relatif masih kecil. Kurang lebih 30% dari kapasitas yang ada yaitu sebanyak 308 kursi penumpang setiap jalannya. Kereta bandara ini memiliki 20 kali PP perjalanan dari Stasiun Bandara Kualanamu ke Stasiun Medan.

"Kami mengharapkan agar dibuatkan stasiun-stasiun persinggahan. Agar masyarakat sampai di Medan tidak harus mencari kendaraan lagi," jelasnya.

Kereta api bandara mulai beroperasi pada 25 Juli 2013 bersamaan dengan beroperasinya Bandara Internasional

Kualanamu. Kereta api ini dioperasikan oleh Railink yang merupakan perusahaan patungan antara Kereta Api Indonesia dan Angkasa Pura II (Persero).

KA Bandara Kualanamu saat ini memiliki frekuensi 20 kali PP perjalanan dari Stasiun Medan ke Stasiun Bandara Kuala Namu. Jadwal per (28 April 2014), berkapasitas 308 tempat duduk, dengan lama perjalanan 30 menit saat menuju bandara, dan 30-47 menit saat menuju Medan (kereta menuju bandara lebih cepat karena diprioritaskan dalam penggunaan rel tunggal dalam rute ini).

Fasilitas yang disediakan dalam kereta api ini adalah fasilitas kenyamanan kereta api eksekutif dengan harga tiket kereta api sekali jalan Rp80.000,00. Proyek kereta api bandara ini merupakan *pilot project* dan akan dikembangkan di beberapa bandara internasional di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Padang. ■

(es). Foto: Suci/hr

Bulog Sumut Perlu Inovasi

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhie Prabowo menilai Bulog Divisi Regional Sumatera Utara bisa dikatakan yang terbaik dari segi kerapihan dan kebersihan.

Meski demikian, fasilitas yang dimiliki masih tergolong standar, sehingga perlu inovasi.

"Kami pernah mengunjungi beberapa Gudang Bulog, disini (Bulog Sumut-red) bisa dikatakan yang terbaik, bersih dan rapi. Namun tetap saja fasilitas atau teknologi yang digunakan masih tergolong standar," ujar Edhie saat mengunjungi Bulog Divre I, Medan, Sumut, Selasa (3/5).

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mencontohkan, bahwa Bulog belum memiliki fasilitas atau teknologi yang mampu menyimpan beras atau komoditi lain dengan waktu yang cukup lama.

"Gudang ini, masih sangat standar. Tidak ada penyimpanan yang dapat bertahan lama. Paling lama dua-tiga bulan, lewat dari itu kondisi barang sudah tidak baik," jelasnya.

Sejatinya, tambah Edhie, saat ini ada metode-metode dan kebijakan yang telah

dibuat pemerintah yakni membeli barang tidak boleh dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, Bulog juga harus memiliki gudang yang bagus dan layak, agar bisa menampung banyak bahan.

"Melihat kondisi cuaca, yang kerap datang secara ekstrem harus ada proses antisipasi dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk bisa menyimpan bahan," papar Edhie.

Oleh karena itu Edhie menegaskan, harus ada inovasi baru dengan pengadaan teknologi yang mumpuni sehingga mampu menyimpan barang dalam jangka waktu yang cukup lama.

"Bulog itu ada untuk membantu masyarakat disaat kelangkaan pasar atas sebuah komoditi, sekaligus membantu



Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Edhie Prabowo saat mengunjungi Bulog Divre I, Medan, Sumut

petani jika pasar berlimpah. Karena tujuan yang baik itulah, kami siap menerima masukan dan inovasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara," tegas Kepala Perum Bulog Divre I Sumut, Fathah Yassin kepada Parleментарia. ■

(Ayu). Foto: Ayu/hr

Sosialisasi BPJS Kesehatan Perjelas Hak dan Kewajiban Peserta

Lewat sosialisasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, keselamatan dan kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI diperhatikan dengan serius.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso memaparkan, agenda sosialisasi ini untuk menjelaskan kepada pegawai tentang hak dan kewajiban pegawai dalam memperoleh layanan kesehatan.

"Dengan sosialisasi ini semua bisa jadi jelas hak dan kewajibannya," ujar Agung saat menyampaikan sambutan pembuka, Senin (9/5).

Menurut anggota Dewan dari dapil Jawa Barat I ini, jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan DPR penting, karena jika pegawai tidak ada gangguan kesehatan maka akan menunjang peningkatan kinerja dan kualitas lembaga secara keseluruhan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menilai penyelenggaraan kesehatan di lingkungan DPR saat ini berangsur-angsur semakin membaik. Sosialisasi ini diberikan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS).

Dalam sosialisasi ini disampaikan juga bahwa BPJS Kesehatan diselenggarakan dengan landasan hukum UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta ada dua peraturan pemerintah yang membahas itu.

Sistem jaminan kesehatan nasional memiliki azas kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso

prinsip kegotong-royongan serta bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan atau nirlaba. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. ■

(foto: jayadi/hr)

Ketua BKSAP Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Iran

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammad di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/5).

Menurut Nurhayati, sebagai badan yang khususnya memberikan saran dan sebagai ujung tombak dari diplomasi Parlemen, DPR selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Kita meminta supaya lebih ditingkatkan lagi hubungan investasi antara Iran dan Indonesia, kemudian juga *people to people contact*, contohnya seperti lebih diperbanyak lagi mahasiswa Iran yang belajar ke Indonesia," ujar Nurhayati.

Dia menyarankan agar Pemerintah lebih aktif dalam memberikan penjelasan kepada pihak negara-negara luar khususnya dalam hal ini negara Iran, bahwa Indonesia juga terbuka untuk menerima mahasiswa-mahasiswa Iran untuk belajar di Indonesia.



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima Dubes Iran

"Kita berharap turis-turis Iran tidak hanya sekedar mampir di Indonesia, sementara tujuan utamanya adalah Australia. Kita ingin Indonesia dapat menjadi tujuan utama para turis tersebut, atau juga bersekolah di Indonesia," tambahnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut juga mengatakan, bahwa di Indonesia sudah ada *culture center* nya Iran, kenapa tidak dibuat Indonesian *culture center* juga di negara Iran, supaya mereka lebih mengerti tentang budaya Indonesia.

Terkait pembahasan masalah terorisme, Nurhayati meminta pihak Iran juga berpartisipasi aktif guna mencari persamaan diantara perselisihan paham-paham yang ada, tidak semata-mata memperbesar perbedaan paham tersebut.

"Kita meminta supaya Iran ikut berperan aktif, yakni ketika terjadi perbedaan paham di antara kelompok atau golongan tertentu, agar dicarikan persamaan pemahannya, dan bukan masalah perbedaan yang justru dibesar-besarkan, agar saling merangkul bukan memusuhi. Masalah terorisme terjadi, antar lain juga dikarenakan adanya perbedaan paham diantara sebagian kelompok atau golongan tersebut," tandasnya. ■

(dep). Foto: jayadi/hr

Petani Sultra Ingin Program Gernas Kakao Dilanjutkan

Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan dan perikanan mengunjungi lokasi perkebunan Kakao (Program Pengembangan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao) di Desa Lamara, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kedatangan Tim Komisi IV untuk melihat langsung lokasi perkebunan dan berdialog langsung dengan kelompok petani kakao dan mereka menginginkan program Gernas kakao dilanjutkan.

Komisi IV DPR RI meminta kepada para petani kakao jujur dalam memberikan laporan hasil program pembangunan pertanian yang dilakukan agar Komisi IV dapat memperjuangkan nasib para petani di Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Kita perlu pengakuan jujur dari petani. Apa yang diperoleh petani dari program-program pembangunan pertanian," kata Ketua Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin OO Sutisna di Kendari,

Sultra, Senin hingga Selasa, (9-10/5) lalu. Wakil Bupati Konawe Selatan Arsalim mengatakan, gernas kakao sudah dilakukan tahun 2009 dan berhenti pada 2015. "Kita punya kebun kakao di sini 20 ribu ha yang dioptimalkan seluas 15 ribu ha, dan yang sudah mendapat bantuan gernas kakao 10 ribu ha," jelasnya.

Lebih lanjut ditambahkan oleh Idris Ketua Kelompok Tani Merabisa di Desa Lamara Kecamatan Benua Kanowe Selatan, sangat merasakan hasil gerakan nasional kakao yang dilaksanakan Kementan. "Sebelum ada gernas kakao kebun kami hanya bisa produksi 500-700 kg per ha per tahun, dengan harga jual biji

kakao hanya Rp 18.500 per kg. Setelah ada gernas kakao, produksi biji kakao dari kebun kami mencapai 1-1,5 ton per ha per tahun dengan harga jual biji kakao Rp 30 ribu/kg. Kami bisa untung Rp 50 juta per tahun," tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman

yang tahan terhadap hama PBK dan VSD serta sarana produksi, bantuan pupuk dan pestisida.

Tanaman yang rusak berat akan dilakukan peremajaan dengan menggunakan benih SE. Sedangkan tanaman yang kondisinya tidak begitu

parah/produktivitas rendah akan direhabilitasi melalui sambung samping dengan klon unggulan yang telah disertifikasi serta intensifikasi melalui pemeliharaan berupa pemangkasan cabang non produktif, pemupukan dll, namun pendanaan untuk program diatas belum digunakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.



Tim Kunker Komisi IV DPR saat berdialog dengan kelompok petani kakao di Sulawesi Tenggara

Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring, yang ikut mendampingi Tim Kunjungan Komisi IV DPR-RI ke Sulawesi Tenggara, menilai bahwa tingginya minat petani kakao ini adalah wajar, karena kondisi tanaman kakao mereka yang selama ini menjadi sumber penghasilan kondisinya mulai memprihatinkan.

Melalui Program Pengembangan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memberikan bantuan untuk kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Bantuan tersebut berupa benih kakao SE (Somatic Embryogenesis)

Pada saat menuju lokasi perkebunan kakao rombongan komisi IV DPR sempat mengalami musibah, salah satu mobil terperosok. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tim kunker Komisi IV DPR untuk melanjutkan pertemuan dengan para petani kakao.

Melihat kondisi di lapangan dan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah di provinsi tersebut, masyarakat tani dan pemerintah daerah menyampaikan harapan kepada Komisi IV DPR-RI agar Gernas ini tetap dilanjutkan. Sehingga upaya peningkatan produksi dan mutu kakao rakyat dapat terlaksana sesuai target. ■

Kepala Badan Keahlian Dewan Terima DPRD Wonogiri

Kepala Badan Keahlian Dewan, Johnson Rajagukguk didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BKD Inosentius Samsul menerima sekaligus melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Wonogiri, guna membahas mengenai Hak dan Kewajiban DPRD sebagai Pejabat Daerah.

"Jadi memang DPRD Wonogiri itu ingin diskusi soal hak dan kewajiban DPRD yang ada di UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan implementasi dari status anggota DPRD sebagai pejabat daerah," terang Johnson usai audiensi, di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta (4/5).

Johnson menjelaskan, mengenai implementasi terhadap hak administrasi pejabat daerah yang tidak sama dengan penjabat negara, ini penting untuk

dipahami setiap anggota DPRD, disamping memang sampai saat ini aturan atau payung hukum mengenai hak dan kewajiban sebagai pejabat daerah belum ada.

"Memang sampai sekarang belum ada konsekuensi implementasi dari status DPRD sebagai pejabat daerah, menurut saya kalau dilihat dari status pejabat daerah berimplementasi dengan keprotokolan yang diatur di dalam UU protokol, tetapi kalau mengenai hak administrasi saya tidak tau," tuturnya.

Sementara itu, dalam penjelasannya, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BKD Inosentius Samsul memaparkan, saat pembahasan RUU Nomor 23 tahun 2014 memang banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk bagaimana pengaturan DPRD yang tidak lagi diatur di dalam MD3. Disamping itu, tambahnya, kenapa UU ini memperkuat posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat karena ada fungsi eksekutif yang diserahkan langsung, artinya DPRD tidak sama dengan Bupati.

"Misalnya di pasal 57 dikatakan, penyelenggara daerah yaitu Bupati dan



Kepala BKD Johnson Rajagukguk didampingi Kapus Perancangan Undang-Undang BKD Inosentius Samsul audiensi dengan DPRD Kabupaten Wonogiri

DPRD, tetapi Bupati menjadi pejabat negara, karena ada kekuasaan Presiden langsung yang diberikan kepada Bupati yang diatur dalam UU. Artinya ada otoritas khusus yang dimiliki mereka karena ada wajah presiden,"katanya.

"Tentu ini memang harus dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara. Jangan sampai ada kewajiban tetapi tidak bisa di implementasikan karena bertabrakan dengan anggaran," tambahnya. ■

(rmm), foto: andri/hr

Kinerja BPBD Papua Barat Diapresiasi

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI. Tidak saja dari sisi pelayanan kepada masyarakat, BPBD Papua Barat juga telah melengkapi diri dengan peta bencana.

Diitemui di Manokwari, Papua Barat, Selasa (3/5), Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang, mengakui, BPBD Papua Barat telah menyiapkan segalanya terhadap ancaman bencana alam yang mungkin terjadi termasuk sosialisasi kepada masyarakatnya.

"Kesiapan BPBD Papua Barat dalam mengantisipasi kemungkinan bencana sangat baik. Mereka mampu melihat bencana-bencana yang akan datang, karena telah memiliki peta bencana. Inilah yang diharapkan dari BPBD di seluruh Indonesia," puji politisi PDI Perjuangan ini.

Kasus PETI Jambi Harus Segera Selesai

Tim Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Institusi Penegak Hukum Senin, (02/05) di Salah satu Hotel di Kota Jambi.

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menggelar Rapat dengar pendapat dengan Jajaran Polda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan BNNP Jambi.

Pada acara tersebut semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan seluruh permasalahan yang dihadapi terkait dengan anggaran, sarana dan prasarana dan juga mengenai Rancangan Undang - Undang Hakim sebagai pejabat Negara.

Ketua Tim Kunker Komisi III Mulfachri Harahap menjelaskan bahwa selain kasus narkoba yang memang menggejala hampir di seluruh wilayah Indonesia, ada satu kasus menarik di wilayah Kepolisian Jambi yang menjadi sorotan Komisi III yaitu kasus penambangan emas tanpa izin atau PETI yang sudah sampai ke tahap mengkhawatirkan.

"Saya kira ini harus menjadi

perhatian kita bersama agar bisa secepatnya mencari jalan keluar sehingga kegiatan penambangan liar itu dihentikan dengan segera karena merusak sistem keseimbangan alam kita, hingga ada banjir yang begitu besar di Sarolangun dan juga masih ada ratusan *excavator* yang aktif melakukan kegiatan tanpa izin. Sudah seharusnya polisi dibantu dengan pihak-pihak terkait bisa segera melakukan penghentian penambangan liar ini," jelas Ketua Tim Kunker yang juga Wakil Ketua Komisi III

Kapolda Jambi Brigjen Pol Musyafak menerangkan bahwa Wapres RI sudah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi sekaligus juga mengumpulkan informasi terkait kasus ini. Karena itu, polisi harus merangkul semua pihak, termasuk institusi lain. "Jadi siapa saja yang mempunyai potensi membantu upaya aparat keamanan harus segera dilakukan. Bila menyangkut lahan, mungkin itu ada di kawasan hutan negara, harus berkoordinasi



Ketua Tim Kunker Komisi III DPR Mulfachri Harahap

dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian ada juga keterlibatan pemerintah daerah kabupaten ditambah pendekatan terhadap organisasi-organisasi non formal agar tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu untuk membantu tugas aparat", tegas Mufachri. ■

(ray), foto: risiko/hr



Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang, saat tinjau BPBD Papua Barat

Yang kini belum dimiliki BPBD Papua Barat adalah pemecah ombak. Pemerintah pusat, lanjut Samsu, perlu segera membantu

sudah rusak dan perlu segera diperbaiki.

"Kalau sudah diperbaiki berarti sektor ekonomi bisa dipacu dalam

BPBD Papua Barat untuk hal ini. Bantuan tersebut dipandang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Papua Barat. Pemecah ombak yang ada di Manokwari

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Dan penting membangun sinergitas antara BPBD kabupaten, provinsi, dan pusat dalam penanggulangan bencana untuk mendukung program pemerintah di bidang infrastruktur," ucap Samsu lagi.

Kepala BPBD Papua Barat, nilai Samsu, sudah menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Bahkan, Kepala BPBD Papua Barat juga sangat kreatif dan energik dalam bekerja. "Kami dari Komisi VIII sudah melihat kondisi objektif di Papua Barat. Sosialisasi yang dilakukan selama ini, baik kepada seluruh BPBD kabupaten maupun masyarakat cukup bagus. ■

(mh) foto: husen/hr

Pencabutan Pembekuan PSSI Adalah Jalan Benar

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, memberikan tanggapan terkait kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya

Menurut Ketua Komisi yang membidangi olah raga ini, pencabutan pembekuan kegiatan PSSI oleh Menpora, pada tanggal 10 Mei yang resmi tercantum dalam Surat Keputusan Menpora no 16 tahun 2016

merupakan jalan yang benar.

"Kami juga ucapkan syukur Alhamdulillah dan apresiasi kepada Pemerintah yang telah berbesar hati untuk kembali ke jalan yang benar," ungkap Teuku dalam rilis yang diterima Parlemen, Rabu (11/5).

Dia juga mengucapkan selamat kepada para atlet, para anggota PSSI dan para pecinta sepak bola nasional, karena dengan ini bisa melakukan kegiatan secara leluasa kembali.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengharapkan agar pembekuan yang telah lalu bisa dijadikan pelajaran, sehingga PSSI bisa berbenah diri dan memperbaiki organisasi mejadi lembaga yang berprestasi.

"Kami juga mengingatkan PSSI, agar kejadian ini bisa sebagai pembelajaran yang berharga. Saat ini publik akan tetap menyoroti agar ke depan PSSI dapat lebih profesional, akuntabel dan berprestasi,"

harapnya.

Teuku menyarankan, untuk mengejar ketertinggalan satu tahun terakhir, dia meminta PSSI segera menghidupkan kembali Kompetisi Nasional, dukungan Teknis dari FIFA serta mempersiapkan Timnas sepak bola Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa. "Dan menjadi kebanggaan kita bersama. Salam olah raga..." seru dia.

Anggota Dewan dari dapil Aceh ini mengatakan, kebijakan pemerintah terhadap PSSI seperti SK Menpora 1307 April 2015 jangan sampai terulang pada Cabang olah raga olimpic lainnya di Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak sistemik dan telah menjadi penyebab berhentinya kegiatan PSSI dan turunnya sanksi FIFA.

"Hal ini juga telah menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa kepada para pemangku kepentingan sepak bola nasional dan bangsa kita," kata Teuku. ■

(foto, mp) foto: azha/hr.

Komisi V DPR RI Dukung NTT Bangun Bandara Baru

Komisi V DPR RI mendukung rencana pembangunan bandara baru sebagai pengganti bandara El Tari yang ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mengingat meningkatnya jumlah penerbangan dari dan ke Kupang dari tahun ke tahun.

Dibangunnya bandara baru di Kota Kupang tak lain karena NTT saat ini merupakan destinasi (tujuan) wisata yang makin tahun makin meningkat, baik jumlah wisatawan manca negara maupun domestik. Menurut Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, per Agustus tahun 2015, jumlah penumpang yang ke NTT sebanyak 121.094 orang, sementara yang berangkat sebanyak 121.229 orang.

Selain itu, dibangunnya bandara baru di Kupang adalah untuk membuka jalur

baru Kupang-Dili (Timor Leste) dan Kupang-Darwin Australia. "Menyangkut slot penerbangan antara Kupang-Dili dan Kupang-Darwin sebanyak 21 slot sudah terpakai. Tentu menambah slot penerbangan, perlu ada MoU baru G to G. Dirjen Perhubungan Udara sudah menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti atas permintaan MoU slot yang baru ini," kata Fary Djemi dalam kunjungan kerja Komisi V DPR ke Provinsi NTT, Kupang, Senin (2/5).

Ditambahkannya, saat ini, bandara El Tari yang masih menggunakan dana

Angkasa Pura I dan masih menggunakan sebagian lahan milik TNI Angkatan Udara. Pembangunan bandara baru di Kota Kupang juga dikarenakan kenyamanan dan pelayanan bandara yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Bandara Tambolaka dan Komodo.

"Kalau Angkasa Pura I tidak bisa dikembangkan, kita sudah minta agar diserahkan ke Kemenhub dan dikelola dengan menggunakan APBN. Tapi AP I sudah siapkan Rp 85 miliar," tambah Fary Djemi. ■

(foto, foto : kresno/hr.



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis

DPR Harapkan IAIN Tetap Istiqomah, Jangan Buru-buru Jadi UIN

Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq mengharapkan kalangan perguruan tinggi Islam harus setia dan istiqomah pada IAIN jangan menjadi UIN. Pengalaman selama ini, yang telah berubah menjadi UIN maka fakultas agama selalu menjadi anak tiri.

Hal itu ditegaskannya saat pertemuan dengan Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar di aula kampus tersebut, Selasa (3/5) lalu. Dalam rangkaian kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay ini hadir pula Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kemenag Anton Bachtiar, dosen, dekan dan mahasiswa IAIN Pontianak.

Hal yang sama dikatakan Ketua Tim Kunker Saleh P. Daulay, kedatangannya ke kampus IAIN ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kampus perjuangan umat Islam ini ke depan dan proyeksinya seperti apa. Namun Rektor belum menjelaskan jumlah mahasiswa berapa, dosen berapa, professor berapa, doktor berapa tahu-tahu mau jadi UIN. Prosefornya baru satu dan perubahan dari IAIN ke UIN ini baru.

Berdasarkan informasi, lanjut dia, kalangan mahasiswa juga ada kekhawatiran, kemana setelah jadi UIN,

jangan-jangan nanti fakultas dakwah, tarbiyah dan syariahnya ditutup. Karena pasti orang akan lebih senang masuk fakultas umum seperti teknik, kedokteran dan fisip.

"Jadi tidak usah muluk-muluk mau berubah jadi UIN dan segala macam. Nanti kalau sudah kuat infrastrukturnya, dosen sudah cukup dan mahasiswa memang membutuhkan, itu kita silahkan," ujar Saleh menandakan.

Kepada Tim Komisi VIII, Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar mengeluhkan kecilnya anggaran yang dikucurkan sehingga untuk membangun satu tower baru disetujui setelah puluhan tahun. Selain itu, pembangunan IAIN selama ini hanya terpusat di Jawa kalau tidak di Malang, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung.

"Kami yang di luar Jawa ini selalu menjadi anak tiri. Tapi mudah-mudahan yang dijanjikan anggota Komisi VIII menjadi angin segar, bahwa anggaran untuk

IAIN Pontianak akan ditingkatkan," ungkap dia.

Kepada segenap mahasiswa Saleh berpesan untuk terus belajar saja dengan benar tidak usah minder. Orang yang berilmu insya Allah akan bisa ditampung dimana saja. Jangan ada kekhawatiran katanya kalau belajar dakwah tidak bonafid, "Nggak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya," kata Saleh mengutip salah satu ayat Al-quran.

Ikut dalam kunker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay ini Itet Tridjati Sumariyanto, M. Hasbi Assyidiki Jayabaya dari FPDI-P, Wenny Haryanto dan Zulfadhli (FPG), Ruskati Ali Baal (F.Gerindra), Dwi Astuti Wulandari dan Linda Megawati (FPD), Bisri Romli dan Arzeti Bilbina Setiawan (FPKB), M. Iqbal Romzi (FPKS), KH Muslich ZA (FPP) dan Hj. Trimurny (F.Nasdem). ■

(mp) foto : mastur p/hr

Tim Kunker Komisi VIII DPR tinjau IAIN Pontianak Kalbar



BERITA BERGAMBAR



Komisi IV DPR RI menemukan impor cabe merah kering di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Senin, (2/5) Foto : ayu/hr



Komisi IV DPR RI meninjau proses pembinaan masyarakat sekitar hutan mangrove yang dilakukan oleh Kemenhut & LH Provinsi Sumatera Utara, Selasa, (3/5) foto : ayu/hr



Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said meninjau pembangunan penanggulangan banjir Sungai Deli di Sumut Senin, (2/5) foto : suci/hr



Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said meninjau BMKG di Medan, Sumut Senin, (2/5) foto : suci/hr



Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Sutan Adil Hendra mengunjungi Benteng Malborough Bengkulu, Minggu (20/3) foto : ray/hr



Ketua Tim Kunker Komisi X Sutan Adil menerima cenderamata dari Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Minggu (20/3) Foto : ray/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



@dpr_ri



DPR RI



@DPR_RI



DPR RI